

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti yang lain dan sangat penting digunakan sebagai dasar pijakan atau acuan dan bahan pendukung peneliti dalam rangka penyusunan penelitian, serta dalam penelitian terdahulu ini menggambarkan persamaan dan perbedaan (kekhasan) terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga memperkuat keinginan peneliti untuk meneliti karena adanya penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah uraian beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

1. Kesiapan Guru dalam Menghadapi Pembelajaran Daring Di SMA Negeri 01 Rengat

Penelitian dilakukan oleh Keke Idri Norsintiya tahun 2020, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan guru dalam menghadapi pembelajaran secara daring di SMA Negeri 1 Rengat. Waktu penelitian dilaksanakan pada Agustus 2020. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah guru SMA Negeri 1 Rengat yang berjumlah 20 orang. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner dan studi dokumentasi. Teknik menentukan sampel dengan *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kesiapan guru dalam menghadapi pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Rengat dilihat dari skor daring dengan rata-rata 3.32 dikategorikan siap, dapat juga dilihat dari persentase angket yakni pada kesiapan fisik terdapat 85.75% yang dikategorikan sangat baik, kesiapan mental 84.25% dikategorikan sangat baik, kesiapan pengetahuan 88.25% dikategorikan sangat baik, kesiapan emosional 93% dikategorikan sangat baik. Proses pembelajaran melalui daring dapat dilaksanakan dengan baik dan rata-rata guru di SMAN 1 Rengat dalam melakukan pembelajaran daring menggunakan media *google classroom* dengan alasan *google classroom* tersebut sudah umum digunakan dan lebih mudah dipahami dalam penggunaannya baik bagi siswa maupun guru. Selain menggunakan *google classroom*, guru di SMA Negeri 1 Rengat juga menggunakan whatsapp group untuk memberikan tugas-tugas setiap mata pelajaran dengan maksud lebih menghemat kuota internet siswa dan guru bisa melihat siswa tersebut sedang online ataupun tidak.

2. Kesiapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Menghadapi Graduasi Di Kecamatan Sumbang Kab. Banyumas.

Penelitian dilakukan oleh Dhanu Wasi Prabangkara tahun 2019, mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kesiapan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dalam menghadapi graduasi di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Kesiapan dalam penelitian ini diukur dari tiga aspek yaitu kondisi kesiapan fisik, mental dan emosional yang dilakukan peneliti untuk dijadikan rumusan masalah. Responden dalam penelitian ini adalah keluarga penerima

manfaat yang sudah menerima bantuan PKH sejak tahun 2013 berdomisili di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang berjumlah 100 orang. Teknik penarikan sampel ditentukan melalui teknik sampel acak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner/angket, observasi dan studi dokumentasi. Adapun validitas alat ukur menggunakan validitas muka dan uji realibilitas dengan menggunakan metode Alpha Cronbach. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui desain metode penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan yang ditampilkan oleh keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dalam menghadapi graduasi di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara keseluruhan termasuk baik. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar responden berada pada kategori kesiapan yang tinggi, sehingga menunjukkan bahwa KPM di Kecamatan Sumbang sebenarnya sudah cukup layak untuk di graduasi. Dari ketiga aspek kesiapan tersebut, didapatkan bahwa responden memiliki skor perolehan terendah pada aspek kesiapan mental karena sebagian besar responden masih belum bisa sepenuhnya merubah pola pikir mereka terutama terhadap masalah pengelolaan keuangan keluarga, sehingga responden masih bergantung pada bantuan sosial PKH. Program yang diusulkan sebagai upaya pemecahan masalah yaitu Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam Menghadapi Graduasi. Tujuan program ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga penerima manfaat agar mereka tidak bergantung lagi kepada PKH dan menjadi keluarga yang mandiri dan sejahtera.

3. Efektivitas Program Pahlawan Ekonomi Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga Kota Surabaya.

Penelitian dilakukan oleh Monalisa dkk tahun 2016, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dari Program Pahlawan Ekonomi terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga di Surabaya. Peneliti menggunakan empat aspek untuk mengukur efektifitas program pahlawan ekonomi di Kota Surabaya yang diidentifikasi dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah peserta program pahlawan ekonomi di Kaza Mall Surabaya dengan skala pengukuran menggunakan *Skala Likert*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan kuesioner dengan analisis data statistik deskriptif dan *Chi-Square* yaitu menjelaskan, meringkas, mereduksi, menyederhanakan, mengorganisasi dan menyajikan data ke dalam bentuk yang teratur sehingga mudah dibaca, dipahami dan disimpulkan serta mengacu ada atau tidaknya hubungan atau keterkaitan antara variabel-variabel yang dinyatakan dalam baris dan kolom.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pahlawan ekonomi efektif terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Hal tersebut dapat dilihat tiga dari empat indikator efektivitas yaitu sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program menunjukkan adanya keterkaitan antara tiga indikator tersebut dengan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, artinya mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.

Jadi semakin efektif tiga indikator tersebut dilakukan kepada peserta program pahlawan ekonomi, maka semakin meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga peserta. Satu indikator lain yaitu ketepatan sasaran program menunjukkan tidak ada keterkaitan dengan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga karena bisa dilihat dari hasil olah data beberapa responden yang tidak sesuai kriteria peserta program bisa mengikuti program pahlawan ekonomi.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti sebagai bentuk perkembangan terhadap konteks yang diteliti untuk mengetahui bahwa data akan mengalami banyak perubahan dan memberikan wawasan bagi peneliti untuk berpendapat atau menuangkan apa yang diketahui di lapangan secara nyata berdasarkan fakta yang ada. Hal ini membuktikan bahwa penelitian terdahulu menjadi salah satu hal penting untuk melakukan penelitian dan menambah wawasan. Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti sesuai dengan objek dan topik penelitian :

No	Peneliti	Judul Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Keke Idri Norsintiya (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020)	Kesiapan Guru Dalam Menghadapi Pembelajaran Daring Di SMA Negeri 1 Rengat	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Persamaan : variabel dan metode penelitian b. Perbedaan : sasaran, objek penelitian dan teknik menentukan sampling. c. Hasil : terdapat kesiapan guru dalam menghadapi pembelajaran daring di SMAN 1 Rengat, proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik.

1	2	3	4	5
2.	Dhanu Wasi Prabangkara (Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2019)	Kesiapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Menghadapi Graduasi Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Persamaan : variabel fokus penelitian yaitu kesiapan, sasaran penelitian yaitu keluarga penerima manfaat dan metode penelitian. b. Perbedaan : program dan aspek yang diteliti, lokasi penelitian c. Hasil : kesiapan KPM PKH dalam menghadapi graduasi secara keseluruhan berkategori tinggi, kecuali aspek kesiapan mental karena KPM masih belum bisa mengubah pola pikir terhadap masalah pengelolaan keuangan keluarga.
3.	Monalisa, dkk (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2016)	Efektivitas Program Pahlawan Ekonomi Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga.	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Persamaan : program yang diteliti dan metode penelitian b. Perbedaan : variabel fokus penelitian dan lokasi penelitian. c. Hasil : program pahlawan ekonomi efektif terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga di Kota Surabaya.

Dari ketiga penelitian di atas, dapat dilihat adanya kesamaan dan perbedaan.

Kesamaan penelitian terdahulu yang dilakukan Dhanu Wasi Prabangkara dengan penelitian ini yaitu terdapat variabel kesiapan dan sasaran kepada keluarga penerima manfaat. Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Keke Idri

Norsintiya dengan penelitian ini terdapat pada sasaran atau responden, objek penelitian dan teknik dalam menentukan sampling. Responden pada penelitian terdahulu yaitu guru di SMAN 01 Rengat, objek penelitiannya adalah pembelajaran daring dan teknik yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu *purposive sampling*. Responden pada penelitian saat ini yaitu keluarga penerima manfaat Desa Tanimulya, objek penelitian program PENA dan teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*. Penelitian terdahulu yang dilakukan Monalisa, dkk memiliki kesamaan, diantaranya program yang diteliti, yaitu pahlawan ekonomi. Keunggulan dari program yang akan diteliti oleh peneliti saat ini adalah program menjadi pahlawan ekonomi nusantara dan direalisasikan langsung oleh Pemerintah Pusat Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga ruang lingkupnya lebih luas dan akan lebih berpeluang untuk pemerataan penerima manfaat program kepada seluruh keluarga penerima manfaat di Indonesia. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu memberikan studi literatur dan referensi.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Kesiapan

Chaplin (2009) menyatakan bahwa kesiapan merupakan tingkat perkembangan dari kematangan dan kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu. Pada tahun 2008, Martin berpendapat bahwa kesiapan adalah kombinasi dari kemampuan dan keinginan seseorang yang berbeda pada tiap-tiap tugas yang diberikan, membagi tingkat kesiapan berdasarkan kuantitas keinginan dan kemampuan bervariasi dari sangat tinggi hingga sangat rendah.

Menurut Hamalik (2008) kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional.

Dari beberapa pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kesiapan merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon/ jawaban dengan cara tertentu. Kesiapan untuk bereaksi timbul dari dalam diri individu dan berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Penjelasan tersebut sama dengan Drever dalam Slameto (2015) mengemukakan bahwa kesiapan (*readiness*) merupakan *preparedness to respond or react* diartikan sebagai kesiapan untuk memberikan respon dan bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses pengembangan usaha melalui program PENA, karena jika sudah ada kesiapan, maka keberhasilan dari program tersebut akan terbukti, dilihat dari para KPM berhasil meraih kata “mandiri” bahkan “maju” dan terlepas dari bantuan sosial.

2.2.1.1 Aspek Kesiapan

Suatu kondisi dikatakan siap jika mencakup beberapa aspek, menurut Slameto (2015:113) ada beberapa aspek yang mempengaruhi kesiapan, yakni :

1. Kondisi fisik, mental, dan emosional
2. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan
3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari.

Aspek lain yang dapat mempengaruhi kesiapan selain di atas adalah aspek lingkungan, karena lingkungan memberikan atau mempengaruhi emosional dan secara langsung berdampak pada sikap setiap individu terhadap sesuatu, serta

berpengaruh terhadap kesiapan dalam melakukan suatu tindakan. Berikut ini penjelasan dari setiap aspek yang mempengaruhi kesiapan, antara lain:

1. Kesiapan fisik, mental, dan emosional

Kondisi fisik (*Physical Condition*) secara umum dapat diartikan dengan keadaan atau kemampuan fisik. Teori kebutuhan dasar manusia juga menunjukkan bahwa salah satu kebutuhannya adalah fisiologis atau fisik yang diperlukan manusia untuk hidup (Abraham Maslow 2014). Kesiapan fisik dalam penelitian ini mencakup kesiapan tenaga dan kesehatan yang cukup baik agar terbangun kekuatan dan keberanian fisik dalam diri seseorang untuk menghadapi segala sesuatu, maka berpengaruh pada hasil dan penyesuaian sosial individu dalam melakukan kegiatan.

Secara etimologi kata “mental” berasal dari bahasa Yunani, yang mempunyai pengertian sama dengan pengertian *psyche*, artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. James Draver memaknai mental yaitu “*revering to the mind*” maksudnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan pikiran atau pikiran itu sendiri. Kata mental diambil dari bahasa Latin yaitu dari kata *mens* atau *metis* yang memiliki arti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Mental adalah kondisi psikis atau kejiwaan dalam diri individu yang dapat mempengaruhi terjadinya tingkah laku dan membentuk kepribadian. Psikis atau kejiwaan ini berarti seseorang secara sadar sudah memiliki niat untuk melakukan sesuatu hal. Kondisi mental menyangkut kecerdasan, dimana manusia dalam kategori di atas normal (mempunyai banyak pengetahuan salah satunya karena berpendidikan tinggi) akan memungkinkan untuk melaksanakan tugas yang lebih kompleks dan memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Menurut Crow dalam Alex Sobur (2016:345) menyatakan bahwa “emosi sebagai suatu keadaan bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai penyesuaian diri terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan”. Kondisi kesiapan emosional dalam penelitian ini adalah kesiapan yang melibatkan emosi pada diri seseorang dalam menghadapi permasalahan, dan mempengaruhi kesiapan keluarga penerima manfaat untuk berbuat sesuatu, seperti perasaan tegang, konflik, cemas dan lain-lain.

2. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan

Sebagaimana yang dikutip oleh Alwisol menurut Murray (2009), kebutuhan atau needs adalah “konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan”. Kebutuhan dapat dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan yang dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya. Kebutuhan disini adalah kebutuhan yang disadari dalam mendorong usaha atau membuat seseorang siap untuk berbuat, sehingga jelas adanya hubungan dengan kesiapan.

R.S Woodworth dalam Alex Sobur (2016:267) mengartikan motif sebagai suatu yang dapat menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak seperti melakukan tindakan, bersikap dan alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.

Terdapat hubungan antara motif dengan minat, seperti yang dikemukakan oleh Purwanto (2010: 56) bahwa minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan

dan mendorong perbuatan tersebut. Dapat diartikan bahwa dalam diri manusia menggunakan motif untuk berinteraksi dengan dunia luar, dari motif akan timbul minat terhadap sesuatu. Objek yang menarik minat seseorang, akan memotivasi untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Minat merupakan suatu motif yang menunjukkan arah perhatian dan aktivitas seseorang terhadap suatu objek karena merasa tertarik dan adanya kesadaran untuk melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan. Kesiapan kebutuhan, motif dan tujuan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, karena minat seseorang akan muncul apabila individu tersebut mempunyai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, serta akan mendorong untuk berusaha dengan kata lain akan timbul motif untuk memberikan tujuan pencapaian seperti ketekunan atau rajin, dan motivasi (perubahan energi seseorang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan). Jika kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka timbul keinginan untuk mulai memilih jenis kebutuhan lain disesuaikan dengan minat dan selera.

3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari

Slameto (2015) menjelaskan bahwa keterampilan adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan akal, pikiran, ide serta kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna dan menghasilkan sebuah nilai lebih dari hasil pekerjaan tersebut yang selalu terkhususkan pada bidang tertentu. Menurut Singer dikutip oleh Amung (2010:61), keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan dengan efektif. Keahlian seseorang tercermin dengan seberapa baik ia melakukan kegiatan yang spesifik, seperti mengoperasikan

peralatan, berkomunikasi, dan lainnya. Keterampilan dalam konteks kesiapan merupakan wujud dari suatu pembelajaran atau pengalaman.

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu, melalui panca indra manusia seperti penglihatan, pendengaran, media masa, dan lain-lain (Notoatmodjo, 2003). Kesiapan pengetahuan merupakan kesiapan dalam bertindak untuk memahami suatu hal. Seseorang akan aktif dan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ketika ketajaman intelegensi, otak dan pikirannya telah sinkron. Keberhasilan seseorang dalam melakukan sesuatu usaha tidaklah dapat dipisahkan dari seberapa jauh ia menguasai dan memiliki pengetahuan serta wawasan tentang hal yang akan dilakukannya, maka akan sangat bermakna bagi seseorang dalam memiliki usaha yang akan digelutinya.

Peneliti menggunakan aspek mental, motif dan keterampilan dari variabel kesiapan untuk dijadikan sebagai fokus masalah dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan peneliti dalam segi waktu, jika seluruh aspek kesiapan dipilih sebagai subjek penelitian, aspek yang dipilih peneliti memiliki keterkaitan sangat erat atau cocok dengan fokus dan tujuan penelitian yang dilakukan, serta dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana keseluruhan kesiapan yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat untuk terlepas dari pemberian bantuan sosial dan beralih menjadi keluarga mandiri melalui pengembangan usaha dalam program PENA. Berikut ini merupakan penjelasan dari tiap-tiap aspek kesiapan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Kesiapan Mental

Kesiapan mental pada penelitian ini merupakan kondisi kesiapan dalam konteks menyeluruh bukan hanya dalam sisi kejiwaan saja melainkan berkaitan dengan pandangan mengenai dirinya sendiri yang merupakan suatu gambaran proses setiap mental individu terdiri atas pengetahuan, harapan atau penghargaan atau keyakinan, dan penilaian terhadap dirinya. Kondisi mental disini menunjuk pada arah penyesuaian diri dan kehidupan sosial keluarga penerima manfaat, dimana mereka yang secara mental sehat akan memiliki konsep diri positif, merasa bahwa dirinya berharga, dan kebutuhan hidup sudah cukup terpenuhi, serta menjadi salah satu faktor utama seseorang dalam mendapatkan minat dan motivasi untuk mencapai sesuatu hal sebaik mungkin. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi, perpaduan dan campuran dari perasaan, harapan, prasangka, cemas, takut dan kecenderungan-kecenderungan lain untuk bisa mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu karena minat sangat besar pengaruhnya untuk mencapai kesiapan dalam pengembangan usaha pada program PENA yang diharapkan dapat merubah pola pikir KPM menjadi lebih baik agar dapat menghadapi proses graduasi dan mewujudkan keluarga mandiri.

Kebutuhan yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kurangnya kesiapan mental berdasarkan buku karya Slameto (2015) mengenai “Belajar dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhi” yaitu dengan membantu menyatakan dan mengembangkan hal maupun sifat yang positif mengenai dirinya sendiri, membantu meningkatkan keyakinan atau rasa percaya diri serta perasaan bahwa dirinya dihargai, memberikan penguatan (*reinforcement*) guna menghasilkan suatu

mental yang baik dengan alasan yang cukup agar mereka mampu dan ingin untuk berwirausaha. Pada dasarnya mental berkaitan juga dengan konsep - konsep lain yaitu minat, sikap, tingkah laku, intensitas, konsistensi. Faktor yang dapat membangkitkan dan mengarahkan tingkah laku dengan kebutuhan tertentu yaitu mengembangkan diri sepenuhnya, merealisasikan potensi-potensi yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dengan menggunakan materi-materi yang sudah dikenal ataupun materi baru sebagai tambahan wawasan, selanjutnya terapkan konsep atau prinsip dalam konteks yang unik dan luar biasa agar individu tertarik untuk terlibat secara langsung.

2. Kesiapan Motif

James Drever dalam Slameto (2015) menjelaskan bahwa "*Motive is an effective-conative factor which operates in determining the direction of an individual's behavior towards an end or goal, consciously apprehended or unconsciously*". Artinya motif adalah faktor konotasi yang efektif dan berperan dalam menentukan arah perilaku seseorang untuk menunjukkan akhir tujuan, secara disadari atau tidak. Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai, namun perlu adanya dorongan, sedangkan yang menjadi penyebab atau daya penggerak dalam melakukan suatu hal adalah motif itu sendiri.

Kesiapan motif seseorang dapat diperhatikan melalui apa yang dapat mendorong untuk melakukan hal dengan baik, mempunyai tujuan untuk berpikir, memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bentuk kesiapan dalam mengembangkan usaha. Kondisi kesiapan motif dapat ditanamkan kepada diri individu dengan cara memberikan

pelatihan atau kebiasaan yang dipengaruhi dan diperkuat oleh keadaan lingkungan.

Berdasarkan uraian makna yang didapat dari pengertian di atas peneliti simpulkan bahwa kesiapan motif merupakan mesin/alat untuk melakukan kegiatan tertentu dalam mencapai suatu tujuan yang berasal dari dorongan hati, suatu hasrat, keinginan, dan kekuatan dalam dirinya. Motif memberikan dampak dan arahan bagi perilaku seseorang karena memiliki pengaruh sangat besar untuk mendorong kesiapan keluarga penerima manfaat dalam memasuki dunia usaha dan mengembangkan usaha, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Kesiapan Keterampilan

Keterampilan seseorang akan mempengaruhi kesiapan untuk melakukan sesuatu, sama halnya dengan kesiapan dalam penelitian ini terkait pengembangan usaha melalui program PENA. Keterampilan yang dimaksud yaitu apakah keluarga penerima manfaat sekitar lokasi penelitian telah memiliki kemampuan dalam mengubah sesuatu hal menjadi lebih bernilai, bermakna dan mencakup keterampilan internal dan eksternal atau pengalaman dalam hal mengembangkan usaha agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang cukup bahkan lebih karena diperlukan keterampilan yang mumpuni, seperti menghasilkan ide-ide kreatif yang unik dan beda dari usaha lain, serta berinovasi, contoh dalam pengemasan produk, varian rasa makanan dan lainnya.

Selain tiga aspek yang mempengaruhi kesiapan, Slameto (2015: 115) juga mengungkapkan tentang prinsip-prinsip kesiapan *atau readiness*, meliputi :

1. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi).

2. Kematangan jasmani dan rohani perlu untuk memperoleh manfaat pengalaman.
3. Pengalaman-pengalaman memiliki pengaruh yang positif terhadap kesiapan.
4. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.

Keempat prinsip tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dimana semua aspek perkembangan saling mempengaruhi seperti kematangan jasmani dan rohani akan mempengaruhi seseorang dalam menghadapi pengalaman-pengalaman yang baru sehingga mendapatkan pengaruh yang positif dalam hidupnya. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki itu adalah hasil dari tumbuh kembang seseorang semasa hidupnya. Kesiapan seseorang juga perlu dibentuk dalam waktu tertentu agar pada waktu yang telah ditentukan seseorang akan siap memberikan respon terhadap situasi tertentu.

2.2.1.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kesiapan

Menurut Stevani (2015) terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan, diantaranya:

1. Faktor Internal yaitu meliputi kematangan baik fisik maupun mental, emosi, tekanan, dorongan, kreatifitas, keinginan atau minat, bakat, semangat, intelegensi, kemandirin, penguasaan, ilmu pengetahuan dan motivasi.
2. Faktor eksternal yaitu meliputi peran masyarakat, keluarga, sarana, prasarana, sekolah, informasi dan pengalaman.

Menurut Dalyono (2005) kesiapan berkaitan dengan beberapa faktor yaitu perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis, seperti alat indera dan kapasitas intelektual serta motivasi, yang menyangkut kebutuhan, minat dan tujuan individu

untuk mempertahankan dan mengembangkan diri, motivasi berhubungan dengan sistem kebutuhan dalam diri manusia dan tekanan lingkungan.

Menurut Yusuf (2005), berpendapat bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi kesiapan yaitu:

1. Pengetahuan dan wawasan

Keberhasilan seseorang dalam melakukan sesuatu usaha/pekerjaan, tidaklah dapat dipisahkan dari seberapa jauh seseorang tersebut menguasai dan memiliki pengetahuan serta wawasan tentang usaha karena akan sangat bermakna bagi seseorang dalam memiliki usaha yang akan digelutinya.

2. Kemampuan, kecerdasan dan kecakapan

Secara konseptual, ada keterkaitan antara kecakapan dengan kemampuan kecerdasan. Kemampuan merupakan daya pikir/nalar seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, baik fisik maupun mental. Kemampuan dapat dibedakan menjadi kemampuan kognitif (*cognitive ability*) dan kemampuan psikomotor (*psychomotor ability*). Kemampuan kognitif dapat dirinci lagi menjadi kemampuan mental umum (*general intellectual ability*) yang sering disebut dengan kecerdasan (*intelligence*), dan kemampuan khusus (*special ability*) atau *soft skill* merupakan keterampilan atau kecakapan dalam berkomunikasi, memiliki sikap jujur, dan bertanggung jawab baik untuk sendiri, berkelompok atau bermasyarakat, oleh karena itu keterampilan mempengaruhi kesiapan untuk melakukan suatu usaha/ pekerjaan.

3. Bakat

Suatu kondisi tertentu pada seseorang berupa potensi khusus yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus dapat mencapai suatu kecakapan

dan keterampilan khusus. Guilford merumuskan bahwa bakat sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan untuk melaksanakan. Bakat (dalam hal ini bakat khusus) mengandung 3 dimensi psikologis yaitu (a) dimensi perceptual, antara lain perhatian dan kepekaan indra, (b) dimensi psikomotor, antara lain kecepatan gerak dan koordinasi, (c) dimensi intelektual, antara lain faktor ingatan dan pengenalan.

4. Minat

Minat seseorang akan menentukan seberapa jauh keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Makin kuat minat dan perhatian seseorang, semakin peduli yang bersangkutan dalam pekerjaan tersebut. Minat merupakan suatu kecenderungan atau reaksi perasaan yang berhubungan terus menerus yang mempolakan perhatian seseorang sehingga membuat dirinya menjadi selektif terhadap objek minatnya.

5. Sikap

Sikap seseorang terhadap suatu usaha merupakan kesiapan yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan usaha. Apabila seseorang menilai positif, maka akan siap melakukan. Sebaliknya, jika seseorang menilai negatif, maka tidak akan melakukan usaha itu dan akan tampak dalam reaksi seseorang terhadap usahanya, oleh karena itu apabila seseorang ingin sukses dalam karir, sikap harus mendukung usaha yang akan dilakukannya.

6. Nilai-nilai

Seseorang akan berusaha/ bekerja dengan baik, teliti, dan berkerja keras apabila yang dikerjakannya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang dianutnya. Kata-kata, tindakan, dan apa yang diputuskannya adalah refleksi diri. Seseorang akan merasa tidak aman, cemas dan mungkin tidak puas apabila tingkah lakunya tidak

konsisten dengan nilai-nilai dan kepercayaannya. Dua hal ini perlu mendapatkan perhatian yaitu, nilai-nilai umum (*general values*) dan nilai-nilai yang berhubungan dengan kerja (*work-related values*). Oleh karena itu, perlu diketahui sistem yang berlaku umum dan kepercayaan seseorang serta nilai-nilai usaha/ kerja dalam pandangan seseorang sebelum seseorang melakukan pilihan pada suatu usaha.

7. Sifat-sifat Pribadi

Diri sendiri adalah orang yang menentukan sikap dan hendak kemana yang diinginkan. Salah satu yang menentukan kepribadian seseorang adalah sifat-sifat yang dimiliki dan mencerminkan keunikan. Sifat-sifat dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu sifat umum dan individual. Sifat umum adalah sifat-sifat yang ditemui sama antara individu satu dengan individu lainnya, sedangkan sifat individual adalah sifat-sifat khas yang terdapat pada tiap individu. Sabar, jujur, ramah, percaya diri, dapat dipercaya, mempercayai orang lain, bertanggung jawab, teliti, adil, bersahabat, tenang, riang, tabah, hati-hati, sopan, patuh, perhatian, menyenangkan, tulus dan bijaksana merupakan sifat yang sering berkaitan dengan kesuksesan pribadi dan karier, terkadang sangat dibutuhkan pada bidang pekerjaan.

Kesimpulan dari berbagai macam pendapat di atas, menjelaskan bahwa kesiapan adalah kondisi seseorang yang siap berdasarkan tingkat perkembangan kedewasaan dalam melakukan aktivitas, memberikan tanggapan dengan cara dan suatu situasi tertentu yang dipengaruhi oleh ketiga aspek dan beberapa faktor.

2.2.2 Tinjauan tentang Keluarga Penerima Manfaat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah

dalam rangka penanganan fakir miskin harus sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berbasis data kependudukan. Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI (Sembako, PKH, PBI) kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu Desa/ Kelurahan. Artinya, setiap Kepala Desa atau Lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mendapatkan bantuan. Dalam penelitian ini, KPM adalah keluarga miskin penerima bantuan sosial aktif Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2.2.3 Tinjauan tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Tinjauan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang diambil dari berbagai sumber yakni Permensos RI No.10 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 akan dijelaskan, sebagai berikut:

2.2.3.1 Pengertian PKH

Dalam Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan kepada keluarga dan/atau orang miskin dan rentan, tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini menjamin masyarakat untuk mendapatkan hak dasar dalam kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup yang layak. Bantuan yang diberikan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program bantuan yang memberikan kontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri berarti kondisi dimana seseorang/ sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak – hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun kehidupan sosial.

2.2.3.2 Tujuan PKH

Tujuan umum Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan Pemensos Nomor 1 Tahun 2018 tujuan Program Keluarga Harapan yaitu:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Secara spesifik tujuan dari PKH ini adalah untuk meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin, status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM, akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM, serta meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.

Program ini akan memberikan manfaat jangka panjang dan jangka pendek kepada anggota Penerima Manfaat PKH. Jangka pendek, PKH memberikan *income-effect* kepada para anggota dengan bantuan berupa uang tunai yang akan diterimanya, hal ini tentu sangat membantu perekonomian keluarga sangat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Jangka panjang, PKH menjadi alat pemutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan.

2.2.3.3 Kriteria Penerima Bantuan PKH

Dalam pasal 3 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa “Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”. Calon penerima bantuan PKH ini setidaknya harus memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu dimana dalam sebuah rumah tangga terdapat:

- a. Kriteria komponen kesehatan yaitu, ibu hamil/menyusui anak berusia nol sampai dengan enam tahun.
- b. Kriteria pendidikan yaitu, anak usia sekolah SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA dan anak berusia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar.
- c. Kriteria kesejahteraan sosial yaitu, lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Setelah sebuah keluarga resmi ditetapkan sebagai KPM PKH, maka akan diberikan kartu peserta PKH kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) yang ada dalam rumah tangga sebagai bukti kepesertaan. Kartu

tersebut berfungsi untuk menerima bantuan yang akan diterima dari PKH dan dapat pula digunakan sebagai kartu Jamkesmas untuk semua anggota keluarga, apabila di dalam sebuah keluarga tidak terdapat perempuan dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

2.2.3.4 Transformasi Kepesertaan PKH

Transformasi Kepesertaan Program Keluarga Harapan merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH. Masa kepesertaan penerima bantuan program ini dirancang selama enam tahun, dengan asumsi selama masa kepesertaan terjadi perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan dan status sosial ekonomi. Menurut Permensos RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, transformasi kepesertaan PKH dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut:

1. Resertifikasi (Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi)

Pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi KPM PKH yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan PKH. Jika hasil resertifikasi menunjukkan perubahan status sosial ekonomi atau tidak memiliki komponen kepesertaan, maka pada tahun keenam peserta dapat keluar dari program (graduasi). Jika belum dianggap layak keluar maka KPM masih menerima tambahan waktu untuk menerima bantuan PKH, dalam hal ini KPM berada pada masa transisi. Kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah.

2. Transisi

Kondisi KPM PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi yang miskin. KPM PKH dengan status transisi

masih diberikan penambahan waktu sebagai peserta, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan KPM PKH, serta ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat sudah tidak lagi menerima Bantuan Sosial PKH.

3. Graduasi

Graduasi terbagi menjadi dua, yaitu graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan, lalu graduasi hasil pemutakhiran data sosial ekonomi merupakan berakhirnya masa kepesertaan berdasarkan pemutakhiran sosial ekonomi dikarenakan KPM sudah dianggap mampu.

Masa kepesertaan penerima bantuan PKH dirancang selama enam tahun, namun pada tahun ke lima kepesertaan akan didata ulang melalui kegiatan resertifikasi. Proses ini merupakan evaluasi atas kepemilikan komponen dan status sosial ekonomi peserta PKH. Bila hasilnya menunjukkan perubahan status sosial ekonomi atau tidak memiliki komponen kepesertaan PKH, maka tahun ke enam peserta PKH dapat keluar dari program (graduasi). Jika belum dianggap layak keluar (transisi), para peserta akan dibekali kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan program komplementaris berbasis ekonomi maupun program perlindungan sosial yang terintegritas dan relevan sehingga membantu peserta meningkatkan daya dan kapasitas kesejahteraan hingga mandiri.

2.2.4 Tinjauan tentang Graduasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, yang dimaksud dengan graduasi adalah kondisi dimana KPM sudah tidak lagi menerima bantuan sosial PKH atau

berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH karena sudah tidak memenuhi syarat penerima bantuan. Proses graduasi bertujuan untuk mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH, memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran, meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial, dan mewujudkan rasa keadilan sosial. Graduasi terbagi menjadi dua model, yaitu:

1. Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak memenuhi kriteria, misalnya tidak memiliki pengurus kepesertaan, tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan: Kesehatan, Pendidikan atau Kesejahteraan Sosial.
2. Graduasi Sejahtera Mandiri merupakan berakhirnya masa kepesertaan PKH berdasarkan pematangan sosial ekonomi karena inisiatif KPM sendiri maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya, misalnya menolak bantuan karena sudah merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan, ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain, mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik misal keterima PNS, memiliki usaha atau kegiatan ekonomi berjalan sukses, dan memperoleh harta kekayaan tertentu.

2.2.5 Tinjauan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berikut ini penjelasan menurut Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai pada Pedoman Umum BPNT tahun 2017:

2.2.5.1 Pengertian BPNT

Salah satu jenis dari bantuan sosial yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bantuan berupa sembako untuk keperluan bahan pangan

para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai Tahun 2017, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E-Warong yang bekerjasama dengan bank.

Pada tahun 2022 BPNT berubah nama dan ketentuan menjadi Kartu Sembako Tunai sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menekankan bahwa BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk uang tunai Rp600.000 sebagai salah satu langkah penting dalam upaya percepatan penyaluran bantuan sosial. Dalam penyalurannya, Kemensos bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia sebagai instansi penyalur. Keputusan menyalurkan BPNT/Kartu Sembako dalam bentuk uang tunai merupakan hasil evaluasi dari penyaluran di sejumlah tempat. Karena sebelumnya, KPM menerima BPNT dalam bentuk paket sehingga tidak bisa bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Terlebih, di sejumlah lokasi kualitas barang (paket) dari bansos BPNT di bawah standar, maka dengan adanya kepastian pencairan ini, diharapkan dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang yang dibutuhkan.

2.2.5.2 Tujuan BPNT

Tujuan program BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu

penerimaan bantuan pangan, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*).

2.2.5.3 Kriteria Penerima BPNT

Penerima manfaat atau sasaran BPNT adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di Kabupaten/Kota pelaksana dan namanya termasuk di dalam daftar KPM BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.

2.2.6 Tinjauan tentang Keluarga Miskin

2.2.6.1 Pengertian Keluarga Miskin

Dalam konsep sosiologi, keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat, memiliki pimpinan dan anggota, pembagian tugas dan kerja, serta memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Menurut Amartasen dalam Houghton dan Shahidur (2012) kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, dan kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan dianggap sebagai sebuah fenomena multidimensional yang menggambarkan akibat dari keadaan diri seseorang atau sekelompok orang yang lemah. Ketika, seseorang tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yakni potensi kecerdasan, mental, dan keterampilan maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, ketidakmampuan mendapatkan,

memiliki, dan mengakses sumber-sumber rezeki, sehingga tidak memiliki sesuatu apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Oleh karena itu, keluarga miskin adalah seseorang yang tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan dan kebutuhan pokok minimum non makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan dasar, pendidikan dasar, transportasi dan aneka/ jasa, seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai akan tetapi tidak dapat dengan secara layak bagi kemanusiaan.

2.2.6.2 Indikator Keluarga Miskin

Timbulnya krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, menyebabkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah. BPS menentukan apakah suatu rumah tangga layak dikategorikan miskin berdasarkan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin. Berikut ini indikator keluarga miskin:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain atau kesulitan memperoleh air bersih.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum, air minum berasal dari sumur/ mata air yang tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah RP. 600.00 perbulan.
13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.2.7 Tinjauan tentang Kewirausahaan

Menurut Wirakusumo yang dikutip oleh Suryana (2003:10) istilah kewirausahaan diambil dari terjemahan kata *entrepreneurship*, dapat diartikan sebagai “*the backbone of economic*” saraf pusat perekonomian atau sebagai “*tailbone of economic*” pengendali perekonomian suatu bangsa. Secara epistemologi, kewirausahaan merupakan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau proses dalam mengerjakan sesuatu baru atau berbeda.

Menurut Zimmerer (1996:51) yang dikutip oleh Suryana (2003:10) kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari, selain itu gabungan dari keberanian dalam menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru.

2.2.7.1 Nilai – nilai Kewirausahaan

Menurut Suryana (2003:20) beberapa nilai penting dari kewirausahaan:

1. Kepercayaan diri (self-confidence), sikap dalam keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas - tugasnya. Kepercayaan diri berpengaruh pada gagasan karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja keras, dan kegairahan berkarya.
2. Berorientasi tugas dan hasil, seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil, adalah orang yang selalu mengutamakan nilai - nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekat kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif.
3. Keberanian mengambil resiko, kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Seorang wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dan memenangkan dengan cara baik.
4. Kepemimpinan, seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat pemimpin, kepeloporan, dan keteladanan, ingin tampil berbeda, lebih dulu,

lebih menonjol. Menggunakan kemampuan kreativitas dan inovatif, ia selalu menampilkan barang dan jasa - jasa lebih cepat, lebih dulu, dan segera berada di pasar. Selalu mengeluarkan barang dan jasa yang berbeda sehingga dapat menjadi pelopor baik dalam produksi maupun pemasaran.

5. Berorientasi ke masa depan, orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada.
6. Keorisinilan atau kreativitas dan inovatif, kemampuan untuk berfikir kreatif baru dan berbeda, sedangkan inovatif kemampuan untuk bertindak berbeda.

2.2.7.2 Wirausaha

Menurut Usman yang dikutip oleh Suryana (2003:11) wirausaha (enterpreneur) dalam konteks manajemen adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya seperti finansial (money), bahan mentah (material), dan tenaga kerja (labor), untuk menghasilkan suatu produk baru, bisnis baru, proses produksi atau pengembangan organisasi usaha.

2.2.7.3 Fungsi Wirausaha

Menurut Schumpeter yang dikutip oleh Suryana (2003:12) fungsi wirausaha yaitu memperkenalkan barang baru/ kualitas baru yang belum dikenal oleh konsumen, melakukan suatu metode produksi dari suatu penemuan ilmiah dan cara - cara baru untuk menangani suatu produk agar lebih mendatangkan keuntungan, membuka suatu pasar yang belum pernah ada/ dimasuki cabang industri yang bersangkutan, membuka suatu dasar baru atau setengah jadi dengan sumber-sumber yang masih harus dikembangkan dan pelaksanaan organisasi baru.

2.2.7.4 Pengembangan Usaha

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas (Anoraga, 2007:66). Jika hal ini dapat dilakukan, maka besar harapan untuk menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan sebuah usaha besar. Pengembangan usaha dalam memperluas dan mempertahankan bisnis agar dapat berjalan dengan baik yaitu membutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, teknologi dan lain-lain.

Jadi kesimpulannya pengembangan adalah melakukan suatu upaya dalam rangka memajukan, memperbaiki, meningkatkan sesuatu yang sudah ada secara teratur dan bertahap agar menjadi lebih baik. Dalam proses pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), langkah awal yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi permasalahan agar dapat menetapkan strategi yang tepat dalam proses pengembangan. Strategi ini berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Adapun pengembangan usaha mikro kecil menengah harus meliputi aspek-aspek (Putra, 2018:971), diantaranya :

1. Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama modal, teknologi, manajemen dan segi lainnya.
2. Peningkatan akses pasar, yang meliputi suatu spectrum kegiatan yang luas, mulai dari pencandan usaha hingga informasi pasar, bantuan produksi, serta sarana dan prasarana pemasaran. Khususnya bagi usaha kecil di perdesaan,

prasarana mendasar akan sangat membantu adalah sarana perhubungan.

3. Pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang sangat penting, kebersamaan ditanamkan sebagai jiwa semangat wirausaha.
4. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan.
5. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

2.2.7.5 Tinjauan tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara menyeluruh kepada masyarakat dan berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Nurwahida, 2018).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai diatur dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

dilakukan oleh perongan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional, dan usaha asing yang dilakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.2.8 Tinjauan tentang Peningkatan Kapasitas

UNDP (*United Nations Development Programme*) dan CIDA (*Canadian International Development Agency*) dalam Milen memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai: proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk:

1. Menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
2. Memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas menurut Grindle (1997) yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai *ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable* serta mengacu kepada *improvement in the ability of*

public sector organizations. Keseluruhan definisi ini, pada dasarnya mengandung kesamaan dalam tiga aspek sebagai berikut (Hardjnto, 2006:8) :

1. Pengembangan kapasitas merupakan suatu proses,
2. Proses tersebut harus dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan institusi atau organisasi, dan
3. Proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.

2.2.9 Tinjauan tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

2.2.9.1 Pengertian Program PENA

Menurut Kementerian Sosial (2022) Pahlawan Ekonomi Nusantara adalah fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam berjuang melepaskan diri dari bantuan sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia meluncurkan Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) yang diadopsi dari program Pahlawan Ekonomi semasa Menteri Sosial Tri Rismaharini menjabat sebagai Walikota Surabaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial agar dapat mengembangkan usahanya.

Melalui Program PENA akan tersaring KPM yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial. Sejalan dengan hal itu, diharapkan adanya peningkatan pendapatan KPM melalui usaha berkelanjutan hingga penerima manfaat program ini mampu didorong untuk ‘naik kelas’ dalam mewujudkan kemandirian, serta memutus mata rantai kemiskinan. Program PENA menawarkan dukungan pengembangan usaha, serta penguatan produksi dengan jumlah bantuan

sebesar Rp6 juta per KPM berupa modal keperluan usaha (non tunai) pada lima klaster (makanan, kerajinan, jasa, pertanian, dan peternakan).

2.2.9.2 Tujuan Program PENA

Dalam mewujudkan tujuan dari pemberdayaan sosial yaitu meningkatkan kemandirian sosial ekonomi bagi fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu, maka berkaitan dengan tujuan dari program ini, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya pendapatan KPM melalui usaha yang berkelanjutan.
2. Tersaringnya KPM yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial atau tidak.
3. Kementerian Sosial berkontribusi terhadap penurunan beban keuangan negara dalam jangka panjang.

2.2.9.3 Kriteria dan Syarat Penerima Manfaat PENA

Kriteria dan syarat penerima manfaat Program PENA yakni:

1. Penerima bantuan sosial aktif antara lain peserta PKH dan BPNT (wajib)
2. Peserta PKH non aktif yang sebelumnya sudah dilakukan asesmen terukur sesuai usaha yang ditekuni.
3. Setuju keluar dari bantuan sosial jika mendapatkan PENA (wajib).
4. Diprioritaskan usia produktif 20-40 tahun.
5. Diprioritaskan dalam Kartu Keluarga tidak terdapat lansia dan disabilitas.
6. Diprioritaskan penerima Rumah Sejahtera Terpadu (RST) 2022 atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2021.
7. Tidak harus sudah memiliki rintisan usaha (punya rencana pembuatan usaha dan lebih disukai).

2.2.9.4 Kluster Usaha PENA

Terbagi dalam 5 kluster usaha pada Program PENA, yaitu sebagai berikut:

1. Makanan (Warung makan seperti bakso, mie, sate, nasi goreng, ayam geprek, dimsum dan lain-lain, Catering, Frozen Food, Kue/ Jajanan/ Makanan Ringan).
2. Kerajinan (Jahit, Anyaman, Batako, Mebel kayu, Ulekan cobek).
3. Jasa (Toko Sembako, Jual sayuran, Laundry, Barbershop, Sablon).
4. Pertanian (Tanaman Hias, Sayur (Jamur/Seledri/Cabai), Buah).
5. Peternakan (Ayam, Bebek, Entok, Burung, Ikan).

2.2.9.5 Tahapan Pelaksanaan PENA

Pelaksanaan Program PENA mempunyai beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum/ Pra
 - a. Penetapan Penerima Manfaat PENA (PKH, BPNT, RST)
 - b. Pembekalan Petugas Sentra/Sendu dan Pendamping Sosial
2. Pelaksanaan
 - a. Asesmen Kebutuhan Peralatan Usaha,
 - b. Proposal/RAB Pembelajaran
 - c. Pembelian Barang,
 - d. Penyaluran Barang
 - e. Pelaporan Keuangan dan Kegiatan
3. Sesudah/ Pasca
 - a. Monitoring
 - b. Evaluasi

Tim lapangan terdiri dari supervisor yaitu petugas pusat, koordinator yaitu petugas sentra dan pelaksana yaitu pendamping sosial dari unsur PKH.

2.2.9.6 Uraian Tahapan Pelaksanaan PENA

Tahapan Pelaksanaan Program PENA dapat diuraikan secara rinci dan jelas, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi kuota PM 70% untuk Nominatif yang berasal dari usulan masyarakat tapi tetap bersumber dari DTKS (bansos/non-bansos), alokasi kuota 30% untuk Non-Nominatif berasal dari data bansos aktif Tri Wulan III, dan data PENA-RST (Rumah Sejahtera Terpadu).
2. Penerimaan data Nominatif dari masyarakat dan pemadanan data Nominatif oleh Pusdatin. Hasil pemadanan dan tindak lanjutnya sebagai berikut:
 - a. Data yang sudah ada di DTKS bansos dan non dapat ditindaklanjuti
 - b. Data yang belum ada di DTKS di-*outreach* untuk melihat ada/tidaknya dan layak tidaknya menerima PENA.
 - c. Data yang NIK-nya anomali diminta untuk diperbaiki.
 - d. Data yang ganda dan tidak layak harus diganti.
3. Penerimaan data BNBA Calon PM PENA dari database Triwulan III PKH dan BPNT aktif yang difilter sesuai syarat dan kriteria yaitu: Penerima Bansos Aktif (wajib); Setuju keluar dari Bansos jika mendapatkan PENA (wajib); Diprioritaskan usia 20-40 tahun (ditoleransi sd. usia 45); Diprioritaskan dalam Kartu Keluarga tidak terdapat Lansia & Disabilitas; Diprioritaskan penerima Rumah Sejahtera Terpadu (RST) 2022/ Rutilahu 2021; Tidak harus sudah punya Rintisan Usaha (punya usaha lebih disukai).

4. Penetapan Calon PM PENA Non-Nominatif melalui penyaringan yang ketat sesuai syarat dan kriteria PM menjadi Data Definitif Non-Nominatif.
5. *Coaching*/Pembekalan Teknis, pelaksanaan penyaluran bantuan PENA untuk petugas pusat, petugas sentra, dan pendamping sosial. Tahapan penyaluran bantuan PENA meliputi: Asesmen, Penyusunan dan Aproval Proposal, Pembelanjaan Bantuan, Penyaluran, Pelaporan, dan Monitoring Evaluasi.
6. Tahap Asesmen lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha setiap PM dan mendata kebutuhan bantuan peralatan usaha dan produksinya. Asesmen lapangan dilaksanakan oleh pendamping sosial PKH yang dikoordinatori oleh petugas Sentra/Sentra Terpadu.
7. Tahap Proposal, terdiri dari empat tahap:
 - a. Penyusunan Proposal "Dukungan Penguatan Usaha dan Produksi" berdasarkan hasil asesmen lapangan. Proposal dibuat per penerima manfaat, disusun oleh pendamping sosial menggunakan format yang telah ditetapkan Pusat, lalu ditandatangani penerima manfaat dan pendamping.
 - b. Verifikasi Proposal oleh Petugas Sentra/Sentra terpadu. Sebelum dikirim ke Pusat, dicek menggunakan ceklist verifikasi yang sudah disiapkan.
 - c. Pengiriman Proposal dalam bentuk PDF ke Pusat melalui link *google drive* yang sudah ditetapkan.
 - d. Pengecekan dan Persetujuan Proposal oleh Tim Pusat sebagai dasar pencairan anggaran dan penetapan PM PENA.
8. Tahap Pembelanjaan Peralatan, terdiri dari 3 tahap:
 - a. Serah Terima uang cash dari Petugas Pusat kepada Petugas Sentra sebagai

koordinator lapangan penyaluran bantuan PENA. Total uang sebesar pagu maksimal Rp.5.500.000 x jumlah PM.

- b. Konsolidasi dan pembagian tugas antara koordinator sentra dengan pendamping sosial untuk proses pembelanjaan meliputi hal-hal berikut:
Penentuan siapa melakukan pembelanjaan untuk PM, Penentuan titik kumpul untuk drop barang dari toko dan tempat pembagian ke para PM, Penentuan waktu dan tempat belanja, dan Memastikan semua bukti belanja (kuitansi, nota, faktur) tidak hilang.
- c. Pelaksanaan Pembelanjaan dilakukan pendamping sosial dikoordinir Petugas Sentra/Sentra Terpadu berdasarkan proposal yang sudah disetujui Pusat.
- d. Ketentuannya diilang melakukan pembelanjaan rokok, minuman keras, dan barang-barang terlarang lainnya. Semua bukti pembelanjaan sudah termasuk didalamnya pajak (pph, ppn) dan ongkos kirim. Perhitungan besarnya ongkos kirim berdasarkan kesesuaian lokasi.

9. Tahap Pelaporan :

- a. Semua bukti pembelanjaan yang asli (Dukungan Penguatan Usaha maupun Bantuan Penguatan Produksi), dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan PENA.
- b. Laporan pertanggungjawaban kegiatan PENA disusun oleh pendamping sosial dan dicek oleh Petugas Sentra untuk memastikan kesesuaian antara RAB dengan bukti-bukti pembelanjaan (kuitansi/struk belanja).
- c. Laporan pertanggungjawaban kegiatan PENA yang sudah dicek oleh petugas Sentra, selanjutnya dikirim pendamping sosial melalui jasa

pengiriman kepada Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial di Kemensos RI, Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat, Kode Pos 10430.

- d. Pendamping sosial menyampaikan ringkasan laporan kegiatan PENA kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

10. Tahap Monitoring dan Evaluasi:

- a. Masing-masing pendamping sosial melakukan monitoring perkembangan usaha PM setelah menerima bantuan PENA, dan wajib membuat laporan perkembangan usaha per PM PENA sebelum dan sesudah menerima bantuan, disertai dokumentasi.
- b. Laporan perkembangan usaha diketahui petugas Sentra/Sentra Terpadu.
- c. Monitoring dan evaluasi dilakukan Tim dari Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan Dinas Sosial. Pendamping sosial dan petugas Sentra terlibat sebagai pendamping lapangan selama proses Monev ini.

2.2.10 Tinjauan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

2.2.10.1 Definisi Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah salah satu elemen penting sebagai upaya strategi pemerintah dalam menetapkan kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multi dimensional. Keberadaannya selalu memberikan dampak positif yang signifikan secara ekonomi terhadap tujuan pembangunan nasional negara secara keseluruhan. Perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan

dalam menghadapi kehidupan penuh dengan resiko, meningkatkan status sosial untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan (Suharto 2009).

2.2.10.2 Definisi Pemberdayaan Sosial

Menurut Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, menyatakan bahwa Pemberdayaan Sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan, penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, peningkatan kelembagaan dalam masyarakat, pendampingan, kemitraan dan penggalangan dana, pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, advokasi sosial, peningkatan keserasian sosial dan bimbingan lanjut.

2.2.11 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial adalah “seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. (Undang-undang No.14 Tahun 2019).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian

sosial meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, menyelesaikan permasalahan, serta dapat menjalankan tugas dan fungsi.

Menurut Edi Suharto (2014:149) berpendapat bahwa:

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu menjalankan tugas - tugas kehidupannya sesuai dengan perannya. Pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani kemiskinan juga pada dasarnya harus diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian (*social functioning*) masyarakat miskin yang dibantunya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang paling penting bagi profesi pekerjaan sosial karena berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta kontribusi positif bagi masyarakat. Konsep ini mengedepankan bahwa manusia adalah subjek dari segenap proses dan aktivitas kehidupan dan memiliki kemampuan maupun potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan.

2.2.11.1 Tujuan Pekerjaan Sosial

Seperti yang telah dirumuskan oleh Pincus dan Minahan (1993:9) dalam buku *Social Work Practice* yang menyatakan tujuan dari pekerjaan sosial adalah :

1. *Enhance the problem solving and coping capacities of people* (mempertinggi kemampuan orang untuk memecahkan dan menanggulangi masalahnya).
2. *Link people with system that provide them with resources, service, and opportunities* (menghubungkan orang dengan sistem yang menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan- kesempatan).
3. *Promote the effective and humane operation of these system* (meningkatkan pelaksanaan sistem-sistem tersebut secara efektif dan manusiawi).

4. *Contribute to the development and operation of these system* (memberikan sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan kebijakan sosial).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sosial memiliki tujuan yang selaras dalam mengentaskan masalah kemiskinan melalui peningkatan keberfungsian sosial individu, kelompok, masyarakat yang memiliki permasalahan sosial dengan menghubungkan sumber-sumber yang mereka butuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, serta dalam meningkatkan maupun mengembangkan pelayanan sosial menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dapat memajukan praktik pekerjaan sosial.

2.2.11.2 Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial berusaha memperkuat keberfungsian orang dan berusaha mengefektivitaskan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber serta kesempatan bagi warganya yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, fungsi pekerjaan sosial menurut Leonora Serafica de Guzman dalam Dwi Heru Sukoco (2011:51) menyatakan 3 fungsi pokok pekerja sosial, diantaranya adalah:

1. Fungsi restorative

Pekerja sosial melakukan fungsi restoratif terhadap bagian-bagian yang tidak atau kurang berfungsi. Fungsi ini mencakup kegiatan penyembuhan dan rehabilitasi. Kegiatan penyembuhan (*curative treatment*) mencakup kegiatan identifikasi, pengontrolan dan penghapusan faktor-faktor yang ada di dalam proses interaksional, khususnya yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan berelasi sosial. Kegiatan rehabilitasi mencakup upaya untuk merekonstruksi dan

mengorganisasi pola-pola interaksi yang telah rusak dan pecah atau membangun kembali pola interaksi yang baru.

2. Fungsi preventif/pencegahan

Dalam konteks pekerjaan sosial fungsi pencegahan berupa kegiatan untuk menemukan secara awal, mengontrol dan menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tidak mampu berfungsi sosial.

3. Fungsi pengembangan

Fungsi pengembangan difokuskan kepada pengembangan keberfungsian sosial orang/klien secara optimal dan pengasuhan (*nurture and optimum*), sehingga dapat terealisasi potensi-potensi untuk meningkatkan pola kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan membangun *self-realization* dan *self-actualization* serta cara-cara efektif untuk mengatasi berbagai macam kesulitan dan tekanan hidup.

Fungsi - fungsi tersebut ditujukan sebagai usaha untuk mencapai keberfungsian sosial atau kemampuan individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan menjalankan tugas-tugas kehidupan mereka.

2.2.11.3 Metode Pekerjaan Sosial

Metode pekerjaan sosial bertujuan untuk mengupayakan pemecahan masalah dengan memperhatikan permasalahan yang dianggap paling penting oleh peneliti, terdiri dari praktik pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga (*social case work*), praktik pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*) dan Praktik pekerjaan sosial makro. Peneliti menggunakan metode intervensi pada tingkat komunitas (*Macro Practice*) dan praktik pekerjaan sosial dengan kelompok.

1. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas (*Macro Practice*)

Netting (2001) mengatakan bahwa pekerjaan sosial komunitas merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana (*planned change*) dalam organisasi dan komunitas. Praktik pekerjaan sosial ini didasari oleh berbagai model dan pendekatan, serta beroperasi sejalan dengan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan pekerjaan sosial. Sejalan dengan pendapat Netting, Edi Suharto (2010) juga menyatakan bahwa, pengembangan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang ada, serta sebagai proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip nilai-nilai keadilan sosial, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi dan kerjasama yang setara, sehingga pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan adalah inti pengembangan masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana mempengaruhi struktur dan relasi kekuasaan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mencegah orang berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan. Menurut Edi Suharto (2010:42), menyatakan bahwa terdapat 3 model dalam metode praktik pekerjaan sosial makro, sebagai berikut:

a. Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*)

Proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Model ini berorientasi pada kemandirian, integrasi, dan kemampuan masyarakat yang berperan sebagai partisipan dalam proses pemecahan masalah secara kooperatif

(bekerja sama) dan pekerja sosial berperan membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan/ kapasitas masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, selain itu mengupayakan pemanfaatan diskusi dan komunikasi antar kelompok dalam masyarakat guna mencapai kesepakatan mengenai fokus masalah yang dihadapi, serta strategi atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah. Peranan dari pekerja sosial yang menonjol dalam model ini adalah enabler, catalyst/ pemercepat pencapaian hasil, koordinator serta edukator.

b. Model Perencanaan Sosial (*social planning*)

Orientasi dalam perencanaan sosial yaitu menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat. Pada model ini, masalah dan keputusan ditentukan melalui tindakan rasional para ahli. Masyarakat disini pada umumnya kelompok rawan sosial ekonomi atau sebagai penerima pelayanan dan pekerja sosial berperan sebagai ahli yang melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan bukan prioritas.

c. Model Aksi Sosial (*social action*)

Perubahan yang mendasar dalam kelembagaan, dan struktur masyarakat melalui pendistribusian kekuasaan, sumber dan pengambilan keputusan merupakan tujuan dari proses dan hasil aksi sosial. Hal tersebut didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah suatu sistem klien yang menjadi korban dari ketidakadilan struktur atau kelompok masyarakat yang tertindas. Dalam aksi sosial masyarakat berperan sebagai pelaku dan pekerja sosial sebagai aktivis advokasi yang membantu masyarakat.

Berdasarkan tiga model praktik pekerjaan sosial makro, peneliti menggunakan model pengembangan masyarakat karena dalam pemecahan masalah ini perlu upaya kemandirian, diskusi atau komunikasi dan partisipan antar kelompok dalam masyarakat secara kooperatif guna mencapai kesepakatan serta strategi atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk proses pemecahan masalah. Pekerja sosial berperan membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan/ kapasitas masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

2. Praktik Pekerjaan Sosial dengan kelompok (*Social Group Work*)

Menurut Gisela Konopka dalam Sundayani (2015:21) metode ini merupakan suatu metode dalam pekerjaan sosial yang bertujuan untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian individu dalam kelompok. Sebagai suatu pendekatan yang secara sadar diarahkan untuk mengembangkan kemampuan individu seperti keterampilan sosial semaksimal mungkin melalui kegiatan dalam suatu kelompok dengan prosedur yang sistematis dan terencana melalui interaksi berupa relasi, proses, saling tukar menukar pengalaman, mengembangkan bakat terpendam dan hobi yang dicapai secara memadai melalui kehidupan individu serta bimbingan kelompok, sehingga akan tumbuh rasa tanggung jawab, motivasi, penyesuaian diri, partisipasi, rasa terikat dan terjadi perubahan dalam perilaku individu. Selama pelaksanaan kegiatan, kelompok dibimbing langsung oleh seorang profesional terlatih/ ahli dalam bidang tertentu dan dibantu pekerja sosial yang berperan sebagai fasilitator untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dan tercapainya tujuan. Peneliti menggunakan salah satu tipe kelompok yaitu *Educational Group* untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari keterampilan

dengan lebih kompleks.

2.2.11.4 Teknik Pekerjaan Sosial

Dalam pengembangan sosial masyarakat, terdapat juga strategi dan taktik dalam praktik pekerjaan sosial (Netting, 2004:250) sebagai berikut:

1. Kerjasama (*Collaboration*)

Kerjasama atau *collaboration* merupakan strategi pengembangan masyarakat ketika kelompok sasaran sudah memahami apa yang akan dan harus dilakukan, sudah memiliki kesadaran dan kehendak atau kesepakatan bersama untuk melaksanakan suatu kegiatan atau menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara kedua sistem yaitu sistem sasaran dengan sistem pelaksana perubahan (*stakeholder*) yang dibutuhkan, dimana kedua sistem tersebut sudah saling menyetujui dilakukannya perubahan. Taktik yang dilakukan adalah:

- a. Implementasi, yaitu kerjasama yang erat antara sistem kegiatan dan sistem sasaran sehingga rencana perubahan dapat di implementasikan.
- b. *Capacity Building*, yaitu pengembangan kemampuan yang dapat dilakukan dengan perluasan partisipasi mengacu pada kegiatan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan merupakan proses menolong kelompok masyarakat sehingga mampu untuk berdaya.

2. Kampanye Sosial (*Social Campaign*)

Suatu upaya untuk mempengaruhi anggota sistem sasaran atau masyarakat agar dapat memahami dan menyadari bahwa perubahan benar - benar dibutuhkan. Taktik yang digunakan adalah pendidikan atau penyuluhan sosial bertujuan untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu menerima apa yang akan dilakukan dan bersedia untuk terlibat secara aktif.

2.2.11.5 Peran Pekerjaan Sosial

Menurut Charles Zastrow dalam Huraira (2010), terdapat beberapa peranan yang dilakukan pekerja sosial dalam menangani kemiskinan, antara lain, yaitu:

1. Enabler (pemungkin)

Peranan sebagai enabler, yakni pekerja sosial membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan kemampuan agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif. Peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (enabler). Peran sebagai pemungkin atau fasilitator bertujuan untuk membantu klien agar menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Pencapaian tujuan diperlukan beberapa strategi, meliputi pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan personal dan aset - aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian, sehingga lebih mudah dipecahkan, pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

3. Supporting (pendukung)

Pekerja sosial bertugas untuk memberikan dukungan kepada orang - orang yang terlibat dalam struktur dan aktivitas masyarakat, meliputi upaya untuk memperkuat seseorang, mengakui, menghargai nilai dan kontribusi orang lain, serta menyediakan dukungan bersifat praktis, formal atau terstruktur.

4. Broker (penghubung)

Pekerja sosial berperan sebagai penghubung individu dan kelompok yang membutuhkan sumber - sumber pelayanan, pertolongan atau bantuan yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi permasalahan atau kendala sesuai dengan kebutuhan - kebutuhan yang dirasakan atau dihadapi masyarakat. Peranan ini dilakukan karena mereka kerap kali tidak mengetahui di mana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut. Ada tiga tugas utama dalam melakukan peranan sebagai broker, yaitu mengidentifikasi dan melokalisir sumber kemasyarakatan yang tepat, menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten, dan mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan klien.

5. Edukator (pendidik)

Pekerja sosial berperan dalam menyampaikan informasi dengan baik, jelas, dan mudah dimengerti oleh masyarakat yang menjadi sasaran dalam hal ini ialah keluarga miskin, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait pemanfaatan dalam mengakses sistem sumber agar taraf hidupnya pun meningkat.

2.2.11.6 Pekerja sosial dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Pekerja sosial Profesional menurut Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu, didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas - tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memberikan kegiatan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pemecahan masalah bagi yang mempunyai potensi tetapi bingung, dan cenderung minta tolong kepada orang lain. Pemberdayaan tentu erat kaitannya dengan perubahan yang bersifat mutlak. Perubahan bukan dalam fisik tetapi adanya perubahan mental dan tidak bisa dilakukan dengan sendiri, tentu perlu ada pihak - pihak terkait yang saling membantu dalam prosesnya. Pekerja sosial menjadi pihak yang memiliki peranan sangat penting dari tahap awal sampai akhir, yaitu memberikan pendampingan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegiatan dan konsultan bagi yang masih bingung dalam mengambil keputusan.

Bagi seseorang yang hidup normal atau untuk memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya, perlindungan sangat dibutuhkan guna menjamin dirinya terlindungi, contohnya sampai ada yang mengasuransikan diri pada lembaga tertentu. Semua orang butuh perlindungan tanpa terkecuali yang sedang mengalami permasalahan dan tentu saja bentuk perlindungannya berbeda - beda. Perlindungan artinya memberikan konsultasi dan advokasi kepada keluarga dari tekanan, ancaman, kekerasan dan masalah yang bersumber dari dalam maupun luar keluarga. Peran pekerja sosial dalam perlindungan sosial yaitu melindungi dalam bentuk apapun dari berbagai masalah, agar tidak kembali menjadi ancaman dan dapat hidup sejahtera, memberikan bantuan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya, serta selalu merahasiakan data - data dari pihak tidak berkepentingan.